



RENCANA STRATEGIS

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2019 – 2023

Bangga, Elit dan Berkembang

Alamat Jl. Dr. Sutomo No.1 Pontianak

Telepon 0561-748881

Web <http://litbang.kalbarprov.go.id>

e-Mail litbang@kalbarprov.go.id

KATA PENGANTAR



Puji Syukur dipersembahkan Kepada Allah Yang Maha Kuasa , atas perkenan-Nya dan segala karunianya kami dapat menyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan Revisi Renstra ini bertujuan untuk menetapkan target kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 - 2023 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Revisi Renstra ini, kami telah mendapatkan banyak dukungan data dan informasi dari berbagai pihak. Berkenaan dengan itu, kami menghaturkan terimakasih kepada **Bapak Sutarmidji, SH, MH Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Drs. Ria Norsan, MM, MH Wakil Gubernur Kalimantan Barat**, khusus kepada **Bapak A.L. Leysandri, SH Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat** dan Ir. Hj. Yuslinda, MM, *Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* yang telah memotivasi, mengingatkan serta mengarahkan kami dalam penyelesaian Penyusunan Revisi Renstra ini.

Sebagai penutup, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Revisi Renstra ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran sebagai masukan kepada semua pemangku kepentingan, agar tercapai target yang telah ditetapkan.

Pontianak , Februari 2021

Dr. Herkulana Mekarryani S., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196603091986032012



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN	9
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.2. Sumberdaya SKPD.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	24
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP.....	45



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan berada di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab termasuk penataan perangkat daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi daerah guna melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam Pembangunan dan Pelayanan public. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu kepada ketentuan perundang-undangan tersebut, telah membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal ini ditandai dengan adanya perubahan manajemen dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu pelaksanaan yang sentralistik kearah pelaksanaan yang desentralistis, demokratis dan otonom. Masyarakat sangat mengharapkan pelaksanaan pembangunan di Prfovinsi Kalimantan Barat dapat mengembangkan kebijakan yang efektif dan efesien dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan intensitas pembangunan yang berkelanjutan dan bangkitnya pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang berwawasan masa depan.

Sehubungan dengan hal pembangunan tersebut , Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang,, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.



Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat maka wajib bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam Penelitian dan Pengembangan.

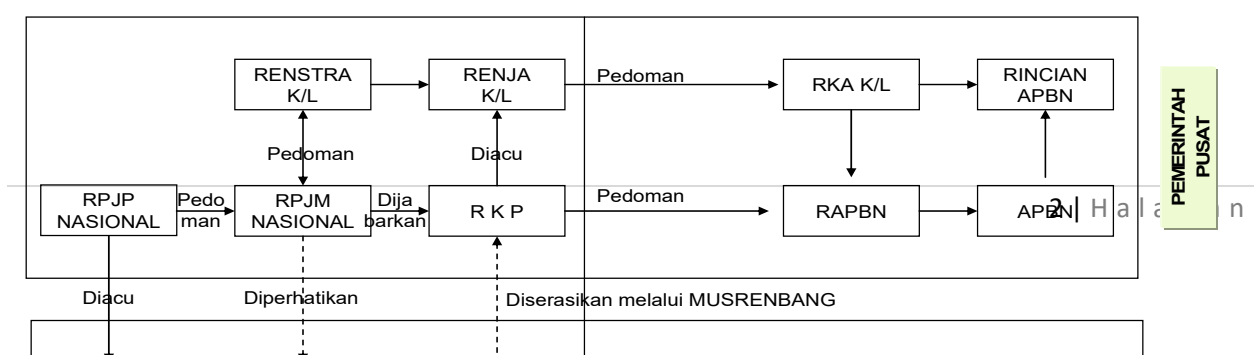
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat isi visi dan misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, program / kegiatan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan beserta pendanaan indikatifnya serta indikator kinerjanya untuk mencapai sasaran dalam RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman/acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan koordinasi pembangunan Penelitian dan Pengembangan disusun Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk : (1) harmonisasi perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan secara terpadu, terfokus dan terprogram dalam mencapai tujuan pembangunan; (2) sebagai bahan dalam melaksanakan acuan, kebijakan program strategis pembangunan dalam kurun waktu 2018 – 2023.

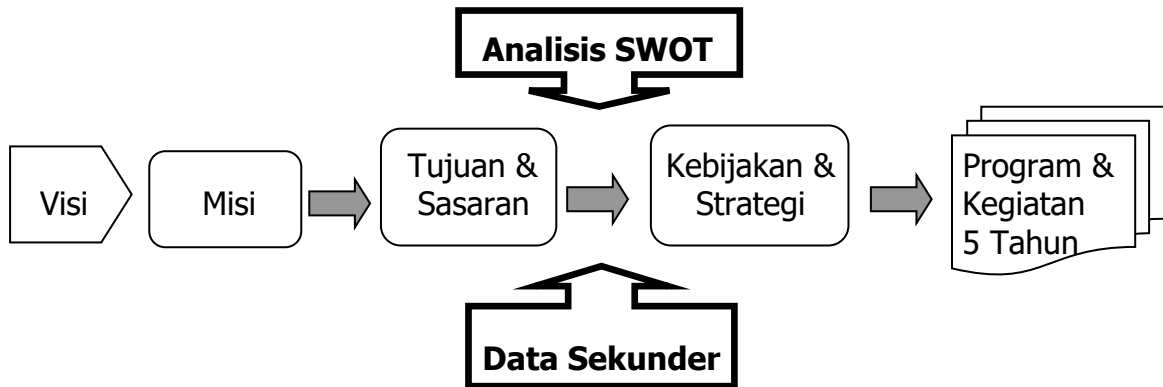
Fungsi Renstra Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada bidang penelitian dan pengembangan pada Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam bagan / tabel di bawah ini digambarkan hubungan dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen lainnya :





Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah yang ditampilkan dalam bagan berikut :



Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Bappeda dan Statistik Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Teknokratik yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
2. Partisipatif yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Politik yaitu agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.
4. Atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui Forum Perangkat Daerah .
5. Kompetitif yaitu dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.
6. Sosio-kultural yaitu perencanaan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Selain melalui beberapa pendekatan, yang perlu diperhatikan adalah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagaimana berikut :

- a) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional;
- b) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah;



- c) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- d) Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- e) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional;
- f) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- g) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan Penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);



16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 8; Tambahan Lembaran Daerah No 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 2; Tambahan Lembaran Daerah No 2);
18. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 125).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat ini, dimaksudkan :

- a) Sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat;
- b) Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat;
- c) Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara penyusunan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d) Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun ke depan.
- e) Sebagai acuan penilaian/pengukuran kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat adalah :



- a) Tersusunnya Perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat yang komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif selaras dengan Visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan. Serta memberikan arahan dan pedoman serta Blandasan bagi aparat Badan Penelitian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan barat, masyarakat maupun *stakeholder* lainnya dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023.
- b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan.
- c) Membangun terciptanya partisipasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan.
- d) Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
- e) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f) Sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
- g) Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan LITBANG dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Kantor Camat Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut diatas dibagi per bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah



2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



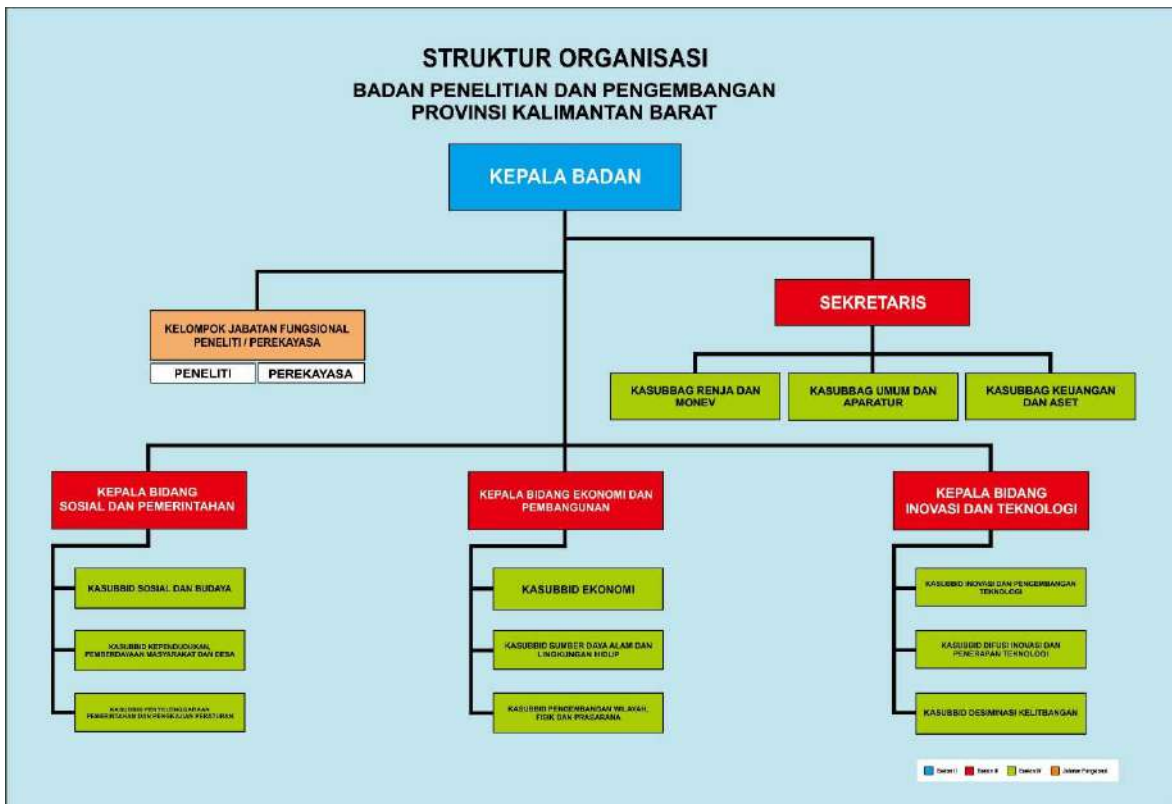
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8), yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :



Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat adalah pembantu Gubernur di bidang Penelitian dan Pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi dalam pelaksanaannya didukung struktur organisasi dengan uraian sebagai berikut :

Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasi, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badan di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan program kerja di bidang penelitian dan Pengembangan.
- b. Perumusan kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang social dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta teknologi dan inovasi.
- d. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.
- e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.



- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesekretariatan di pimpin oleh seorang *Sekretaris* yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan asset serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di lingkungan sekretariat.
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan asset.
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum aparatur, serta pengelolaan keuangan dan asset.
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum aparatur, serta pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan asset serta umum dan aparatur di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan.
- j. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

- Subbag Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi.
- Subbag Keuangan dan Asset.
- Subbag Umum dan Aparatur

Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Sosial dan Pemerintahan bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang social dan budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang social dan pemerintahan.

- a. Penyusunan program kerja di Bidang social dan pemerintahan.
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang social dan budaya.
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.
- e. Pengkoordinasian di bidang social dan pemerintahan.
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang social dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang social dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang social dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang social dan pemerintahan.
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang social dan pemerintahan.
- k. Pelaksanaan tugas lain di bidang Sosial dan Pemerintahan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi 3 Sub Bidang :

- Sub Bidang Sosial dan Budaya
- Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan



Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Ekonomi dan Pembangunan bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup, Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi dan pembangunan. Di mana dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi.
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana.
- e. Pengkoordinasian di bidang ekonomi dan pembangunan.
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ekonomi dan pembangunan.
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ekonomi dan pembangunan.
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi 3 sub bidang yaitu :

- Sub Bidang Ekonomi
- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Inovasi dan Teknologi bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi, desiminasi kelitbangan serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan



pelayanan dan administrasi di bidang inovasi dan teknologi. Di mana dalam melaksanakan tugasnya Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di bidang inovasi dan teknologi.
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang inovasi dan pengembangan teknologi.
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- d. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang desiminasi kelitbangan.
- e. Pengkoordinasian di bidang inovasi dan teknologi.
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di di bidang inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang inovasi dan teknologi.
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang inovasi dan teknologi.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan di bidang inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Inovasi dan Teknologi membawahi :

- Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
- Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
- Sub Bidang Desiminasi Kelitbangan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan urusan Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini memiliki personil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disamping itu terdapat pula tenaga honorer tidak tetap yang bekerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung tugas-tugas perkantoran, sebanyak 12 (dua belas) orang.

Adapun susunan kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini :



Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin
(Desember 2018)

No.	PNS	Jumlah
1.	Laki-Laki	28
2.	Perempuan	16
Jumlah		44

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Kontrak Menurut Jenis Kelamin
(Desember 2018)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	10
2	Perempuan	2
Total		12

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan
(Desember 2018)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Doktor (S3)	0
2.	Pasca Sarjana (S2)	9
3.	Sarjana (S1)	25
4.	Diploma	1
5.	SLTA	9
6.	SLTP	0
7.	SD	0
Total		44



Tabel 1.4. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
(Desember 2018)

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV /b)	8
3.	Pembina (IV/a)	3
4.	Penata Tingkat I (III/d)	10
5.	Penata (III/c)	4
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8
7.	Penata Muda (III/a)	8
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	0
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	0
Jumlah		44
12.	Tenaga Kontrak	12
Jumlah Keseluruhan		56

Tabel 1.5. Komposisi Pegawai Menurut Tenaga Fungsional Tertentu
(Desember 2018)

No.	Jabatan Fungsional Tertentu PNS	Pendidikan			Jumlah (Orang)
		S1	S2	S3	
1.	Peneliti Madya	1			1
2.	Peneliti Muda				0
3.	Peneliti Pertama	7			7
4.	Perekayasa Madya	1			1
5.	Perekayasa Muda				0
6.	Perekayasa Pertama				0
Total					9



Tabel 1.6. Komposisi Pegawai Jabatan Struktural dan Fungsional
(Desember 2018)

No.	Pejabat Eselon	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	Kepala Badan	1
2.	Eselon III	Sekretaris Badan	1
3.	Eselon III	Kabid Sosial dan Pemerintahan	1
4.	Eselon III	Kabid Ekonomi dan Pembangunan	1
5.	Eselon III	Kabid Inovasi dan Teknologi	1
6.	Eselon IV	Kasubbag Umum dan Aparatur	1
7.	Eselon IV	Kasubbag Renja dan Monev	1
8.	Eselon IV	KaSubbag Keuangan dan Aset	1
9.	Eselon IV	Kasubdid Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
10.	Eselon IV	Kasubdid Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan	1
11.	Eselon IV	Kasubdid Sosial dan Budaya	1
12.	Eselon IV	Kasubdid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1
13.	Eselon IV	Kasubdid Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana	1
14.	Eselon IV	Kasubdid Ekonomi	1
15.	Eselon IV	Kasubdid Inovasi dan Pengembangan Teknologi	1
16.	Eselon IV	Kasubdid Desiminasi Kelitbangan	1
17.	Eselon IV	Kasubdid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1
Jumlah Pejabat Eselon II			1
Jumlah Pejabat Eselon III			4
Jumlah Pejabat Eselon IV			12
Jumlah Jabatan Fungsional Khusus			9



Jumlah Jabatan Fungsional Umum	17
Jumlah Analisis Kepegawai Pertama	1
TOTAL	44

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan **prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung atau tanah.

Berikut adalah daftar inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki dan tercatat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 1.8 Daftar Infentarisasi Sarana dan Prasarana

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
2	02		Peralatan dan Mesin			
		02	Alat-Alat Berat	1	14.870.000,00	
		03	Alat-Alat Angkutan	5	491.533.700,00	
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	283	874.585.824,00	
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	4	38.916.772,00	
			Jumlah	293	1.419.906.296,00	
3	03		Gedung dan Bangunan			
		11	Bangunan Gedung	7	1.785.209.788,00	
			Jumlah	7	1.785.209.788,00	
			Jumlah Total	300	3.205.116.084,00	

Sumber KIB Balitbang 2018



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan perangkat daerah yang menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan dimana hasil-hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan. Indikator kinerja program yang ingin dicapai ada 4 yaitu :

1. Tersedianya dokumen kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang digunakan untuk merumuskan kebijakan.
2. Tersedianya dokumen kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan untuk merumuskan kebijakan.
3. Tersedianya dokumen kelitbangan bidang inovasi dan teknologi yang digunakan untuk merumuskan kebijakan.
4. Tersedianya kelitbangan pendukung.

Dalam kurun waktu priode 2013-2018 Badan Litbang telah banyak melaksanakan penelitian-penelitian yang akan dapat dimanfaatkan untuk kebijakan daerah, tetapi dikarenakan Badan Litbang belum mengeluarkan rekomendasi sehingga hasil-hasil penelitian belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Untuk lebih menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai Kinerja Pelayanannya pada priode 2013 s/d 2018 dapat tergambar pada tabel dibawah ini :



Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat



Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat



Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis Pelayanan yang diberikan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis penelitian dan pengembangan yang meliputi :

1. Koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang terukur dan terpadu;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penelitian dan pengembangan;
4. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Peneliti;
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian informasi penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan baik secara vertikal yakni Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun hirosontal yakni antar SKPD Provinsi;
6. Meningkatkan mekanisme kinerja penelitian dan pengembangan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
7. Memberikan informasi potensi pembangunan Kalimantan Barat.

Dari aspek pelayanan yang diberikan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, maka yang menjadi target atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- Unsur Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah) dalam memberikan informasi, kontribusi dalam pemikiran strategis di bidang penelitian dan pengembangan sebagai dasar untuk urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- SKPD Provinsi, BAPPEDA Kabupaten/Kota dalam hal penyediaan informasi dan data untuk Perencanaan;
- Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam penelitian dan pengembangan sebagai informasi untuk urusan perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / Strength, Penyusunan rencana pembangunan sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum, namun disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan baik secara Nasional maupun Daerah.

Penelitian dan Pengembangan tidak terlepas dari perencanaan pembangunan, hasil kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu acuan dalam mendukung Kebijakan Daerah. Oleh sebab itu diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana serta prasarana yang memadai.

Permasalahan Badan Litbang Provinsi Kalimantan Barat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus dapat ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme serta proses penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan, dimana hasil penelitian sosial dan pemerintahan belum dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan daerah.
2. Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme serta proses penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan, dimana hasil penelitian ekonomi dan pembangunan belum dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan daerah.
3. Belum optimalnya hasil penelitian inovasi dan teknologi dalam memberikan kontribusi terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan daerah serta belum optimalnya peran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dalam memfasilitasi Inovasi Daerah terhadap Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah secara berkesinambungan.
4. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama Badan penelitian dan pengembangan Provinsi Kalimantan Barat secara tepat dan terarah dengan Instansi vertikal yang



bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan, Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta belum optimalnya publikasi penelitian, perekayasaan dan inovasi daerah untuk memberikan informasi kepada perangkat daerah serta masyarakat luas tentang hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti serta perekayasa dan inovasi daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur terpilih telah dirumuskan menjadi Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan dituangkan kedalam Rencana Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT
MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**

Penjabaran makna untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kalimantan Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi tersebut dituangkan ke dalam 6 misi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan



Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

3. **Mewujudkan kualitas lingkungan hidup masyarakat**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Berdasarkan misi tersebut di atas, maka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Litbang sebagai rumpun urusan penunjang yaitu Urusan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD 2019-2023 adalah misi Dua yaitu "***Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance***", dimana kegiatan penelitian dan pengembangan yang ada pada Badan Litbang diperlukan dalam hal :

- 1) Kebijakan dan regulasi pemerintahan,
- 2) Rekomendasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dalam hal evaluasi rencana dan kinerja pembangunan,
- 3) Pelaksanaan kerjasama pemetaan dan pengembangan potensi wilayah dan sumber daya alam,
- 4) Sistem inovasi daerah dan komunitas dan



5) pengembangan IPTEK.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga, Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Bappeda menjalankan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan, dengan lebih khusus melakukan Perumusan Kebijakan, Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun provinsi melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat kurang optimal dalam Membangun sinergi inovasi di Kabupaten/Kota dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Pengembangan SDM. Badan Litbang harus lebih banyak membangun kerja sama kelitbangan dengan Kabupaten/Kota atau instansi vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya dengan berkerjasama dengan Kabupaten/Kota adalah kegiatan Rakor Kelitbangan dimana sudah ada pembagian kewenangan dalam kegiatan tersebut. Penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung kemajuan daerah adalah



penelitian dampak sosial pembangunan pelabuhan kijang di Kabupaten Mempawah, yang diharapkan dapat memberikan sumbang fikiran untuk pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menghadapi masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan pelabuhan kijang tersebut.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Litbang tidak adan yang bersinggungan langsung dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungan hidup strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Penelitian dan Pengembangan secara umum, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum Badan Peneltian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, adalah dimana hasil-hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat



belum dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan daerah, untuk itu pada priode lima tahun mendatang Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tantangan bagaimana meningkatkan kualitas kelitbangan yang dihasilkan agar dapat mendukung kebijakan daerah Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan yang akan dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu periode Renstra 2018 – 2023 adalah meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah.

Sasaran Jangka Menengah yang akan diterapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan.
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan.
3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi.
4. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat beserta indikator kinerja dan target kinerja tujuan/sasaran dalam 5 tahun masa Renstra disajikan dalam tabel berikut.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau menguasai persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yaitu "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan". Sedangkan Untuk Misi mengusung Misi Kedua yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip Good Government.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 4 (empat) strategi yang akan dijalankan yaitu :

1. Menata sistem penentuan pilihan jenis dan topik kelitbangan sosial dan pemerintahan yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan kelitbangan prioritas secara selektif.
2. Menata sistem penentuan pilihan jenis dan topik kelitbangan ekonomi dan pembangunan yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan kelitbangan prioritas secara selektif.
3. Menata sistem penentuan pilihan jenis dan topik kelitbangan dan memperkuat fasilitasi inovasi daerah yang terintegrasi serta berkoordinasi dengan baik dan berkesinambungan.
4. Memperkuat kerjasama kelitbangan dan sistem informasi database kelitbangan, serta mempublikasikan hasil-hasil penelitian, perekayasaan, dan inovasi daerah.



Arah kebijakan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mencapai tujuan Renstra 2018-2023 adalah :

1. Optimalisasi hasil kelitbangan sosial dan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan daerah.
2. Optimalisasi hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan daerah.
3. Optimalisasi hasil kelitbangan dan penyelenggaraan fasilitasi inovasi daerah secara berkesinambungan.
4. Optimalisasi kerjasama kelitbangan yang dilaksanakan dan menginformasikan hasil-hasil kelibangan.

Strategi dan arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu Renstra 2018 – 2023 secara lengkap tertuang dalam tabel berikut.



Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	Menata Sistem Penentuan Pilihan Jenis dan Topik Kelitbangan Sosial dan Pemerintahan yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan kelitbangan prioritas secara selektif	Optimalisasi hasil Kelitbangan social dan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan daerah.
	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	Menata Sistem Penentuan Pilihan Jenis dan Topik Kelitbangan Sosial dan Pemerintahan yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan kelitbangan prioritas secara selektif	Optimalisasi hasil Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan daerah.
	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	Menata Sistem Penentuan Pilihan Jenis dan Topik Kelitbangan Sosial dan Pemerintahan yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan kelitbangan prioritas secara selektif	Optimalisasi hasil Kelitbangan dan Penyelenggara fasilitasi inovasi daerah secara kesinambungan
	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	Menata Sistem Penentuan Pilihan Jenis dan Topik Kelitbangan Sosial dan Pemerintahan yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan kelitbangan prioritas secara selektif	Optimalisasi Kerjasama Kelitbangan yang dilaksanakan dan menginformasikan hasil-hasil Kelitbangan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, yang telah dituangkan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang berlaku dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Provinsi Kalimantan Barat sesuai tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016.

Selanjutnya Program dan Kegiatan Badan Litbang Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta Sumber Daya Aparatur dan sarana serta prasarana Badan Litbang dan (2) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi (prioritas) yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus Penelitian dan Pengembangan.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

B. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu tahun 2018 sampai dengan 2023 tertuang dalam tabel berikut.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan pengukuran, dalam hal ini adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan dari pelaksanaan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.

Tolok Ukur sebagai pengukuran kinerja pelaksanaan rencana pembangunan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat secara rinci sesuai dengan kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2018-2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai indikator kinerja yaitu Jumlah hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah.

Indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat secara langsung menunjuk kinerja, yang akan dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu Renstra 2018 - 2023 beserta target capaian setiap tahunnya, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, tertuang dalam tabel berikut.



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan acuan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan program kerja selama tahun 2018-2023. Renstra tersebut dalam implementasinya perlu disesuaikan dan dijabarkan lebih rinci setiap tahun dalam sasaran, kegiatan, penganggaran, pelaksana dan penanggungjawab yang akan dilakukan oleh Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat secara khusus dan secara umum kondisi, situasi dan potensi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis pembangunan akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat dan disiplin para aparat serta peran aktif masyarakat. Untuk itu, segenap aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kalimantan Barat harus bersungguh-sungguh melaksanakan program dan rencana pembangunan Tahun 2018-2023 agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 ini disusun untuk dijadikan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Februari 2021

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kalimantan Barat

Dr. Herkulana Mekarryani S., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660309 198603 2 012

**Rencana Program/ Kegiatan dan Pendanaan
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		0	14 Rekomendasi	5.500	19 Rekomendasi	7.735	19 Rekomendasi	8.665	22 Rekomendasi	10.469	20 Rekomendasi	10.949	94 Rekomendasi	43.319	Kepala Balitbang Provinsi Kalimantan Barat	
Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Sosial dan Pemerintahan	0	8 Rekomendasi	1.135	6 Rekomendasi	1.074	7 Rekomendasi	1.323	11 Rekomendasi	1.734	7 Rekomendasi	1.689	39 Rekomendasi	6.953	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan	
Fasilitasi Pemberian Izin Penelitian	Jumlah Izin Penelitian		-	0	5 Izin Penelitian	5	5 Izin Penelitian	5	5 Izin Penelitian	5	5 Izin Penelitian	5	20 Izin Penelitian	20		
Idea Concept Paper (ICP) Kelitbangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penelitian untuk 1 Tahun ke Depan		1 Dokumen	110	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	110		
Kajian Aktual Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kajian Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1 Kajian	94	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Kajian	94	Kepala Sub Bidang Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Kajian Aktual Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		-	0	1 Kajian	107	-	0	1 Kajian	139	-	0	2 Kajian	246	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
Kajian Aktual Sosial dan Budaya	Jumlah Kajian Sosial dan Budaya		-	0	-	0	1 Kajian	122	-	0	1 Kajian	159	2 Kajian	281	Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya	
Pendampingan Penelitian dan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Penelitian Bidang Sospem		1 Dokumen	56	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	56		
Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Judul Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		1 Judul Penelitian	281	2 Judul Penelitian	384	2 Judul Penelitian	438	2 Judul Penelitian	499	2 Judul Penelitian	569	10 Judul Penelitian	2.172	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Penelitian Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Judul Penelitian Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2 Judul Penelitian	208	2 Judul Penelitian	301	2 Judul Penelitian	343	2 Judul Penelitian	391	2 Judul Penelitian	446	10 Judul Penelitian	1.690	Kepala Sub Bidang Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Penelitian Sosial dan Budaya	Jumlah Judul Penelitian Sosial dan Budaya		1 Judul Penelitian	186	1 Judul Penelitian	276	2 Judul Penelitian	315	2 Judul Penelitian	359	2 Judul Penelitian	409	8 Judul Penelitian	1.544	Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya	
Penyusunan Naskah Akademis	Jumlah Naskah Akademis		-	0	-	0	2 Naskah Akademis	100	2 Naskah Akademis	100	2 Naskah Akademis	100	6 Naskah Akademis	300		
Penyusunan Pergub Kelitbangan	Jumlah Peraturan Gubernur Kelitbangan		1 Peraturan Gubernur	37	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	37		
Temu Ilmiah Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Pertemuan Temu Ilmiah		3 Pertemuan	162	-	0	-	0	4 Pertemuan	240	-	0	7 Pertemuan	402		
Program Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	5 Rekomendasi	967	9 Rekomendasi	1.088	7 Rekomendasi	1.126	7 Rekomendasi	1.284	9 Rekomendasi	1.583	37 Rekomendasi	6.048	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
Kajian Aktual Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	Jumlah dokumen Kajian Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana		-	0	1 Kajian	88	-	0	-	0	1 Kajian	130	2 Kajian	218	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	
Kajian Aktual Ekonomi	Jumlah dokumen Kajian Ekonomi		-	0	-	0	1 Kajian	100	-	0	-	0	1 Kajian	100	Kepala Sub Bidang Ekonomi	
Kajian Aktual Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Kajian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup		1 Kajian	77	-	0	-	0	1 Kajian	114	-	0	2 Kajian	191	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
Pendampingan Penelitian dan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Penelitian Bidang Ekbang		1 Dokumen	136	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	136		
Penelitian Ekonomi	Jumlah Judul Penelitian Ekonomi		2 Judul Penelitian	192	2 Judul Penelitian	300	2 Judul Penelitian	342	2 Judul Penelitian	390	2 Judul Penelitian	444	10 Judul Penelitian	1.668	Kepala Sub Bidang Ekonomi	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Penelitian Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	Jumlah Judul Penelitian Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana		2 Judul Penelitian	210	2 Judul Penelitian	300	2 Judul Penelitian	342	2 Judul Penelitian	390	2 Judul Penelitian	444	10 Judul Penelitian	1.686	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	
Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Judul Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup		-	0	2 Judul Penelitian	300	2 Judul Penelitian	342	2 Judul Penelitian	390	2 Judul Penelitian	444	8 Judul Penelitian	1.476	Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	
Pengembangan Wawasan Kelitbangan	Jumlah ASN yang mengikuti		56 Orang	102	-	0	-	0	-	0	-	0	56 Orang	102		
Pengendalian Mutu Penelitian	Jumlah Peneliti yang dikendalikan		8 Judul Penelitian	250	-	0	-	0	-	0	-	0	8 Judul Penelitian	250		
Temu Ilmiah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Pertemuan Ilmiah		-	0	2 Pertemuan	100	-	0	-	0	2 Pertemuan	120	4 Pertemuan	220		
Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1. Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi	0	0	0	1 Rekomendasi	250	2 Rekomendasi	335	1 Rekomendasi	325	1 Rekomendasi	370	5 Rekomendasi	1.280	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi	
Penelitian Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Jumlah Judul Penelitian Inovasi dan Pengembangan Teknologi		-	0	1 Judul Penelitian	250	1 Judul Penelitian	285	1 Judul Penelitian	325	1 Judul Penelitian	370	4 Judul Penelitian	1.230	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Penembangan Teknologi	
Temu Ilmiah Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pertemuan Ilmiah		-	0	-	0	1 Pertemuan	50	-	0	-	0	1 Pertemuan	50		
	2. Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi	0	1 Rekomendasi	938	3 Rekomendasi	970	3 Rekomendasi	1.118	3 Rekomendasi	1.100	3 Rekomendasi	1.266	13 Rekomendasi	5.392	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi	
Anugrah Balitbang Award	Jumlah Penghargaan		-	0	3 Penghargaan	75	3 Penghargaan	86	3 Penghargaan	97	3 Penghargaan	111	12 Penghargaan	369		
Expo Inovasi Kelitbangan	Jumlah Produk Inovasi yang di Pamerkan		-	0	20 Produk Inovasi	150	20 Produk Inovasi	171	20 Produk Inovasi	195	20 Produk Inovasi	222	80 Produk Inovasi	738		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Fasilitasi HKI	Jumlah HKI		-	0	2 HKI	125	2 HKI	125	2 HKI	125	2 HKI	125	8 HKI	500		
Lomba Inovasi Daerah Se-Kalbar	Jumlah Inovasi yang dilombakan		-	0	3 Inovasi	250	3 Inovasi	250	3 Inovasi	250	3 Inovasi	250	12 Inovasi	1.000		
Lomba Karya Ilmiah (LKI)	Jumlah Karya Ilmiah (LKI)		45 Karya Ilmiah	305	-	0	45 Karya Ilmiah	250	-	0	45 Karya Ilmiah	250	135 Karya Ilmiah	805		
Lomba Karya Perekayasaan (LKP)	Jumlah Karya Perekayasaan		30 Karya Perekayasaan	162	30 Karya Perekayasaan	162	-	0	30 Karya Perekayasaan	162	-	0	90 Karya Perekayasaan	486		
Penguatan Inovasi Daerah (IDa)	Jumlah Inovasi Daerah yang difasilitasi		Data Inovasi Daerah	182	3 Inovasi	208	3 Inovasi	237	3 Inovasi	270	3 Inovasi	308	12 Inovasi	1.205		
Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Jumlah Peserta		90 Peserta	112	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Kegiatan	112		
Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Database Litbang	Jumlah Peserta Workshop		56 Peserta	56	-	0	-	0	-	0	-	0	56 Peserta	56		
Peningkatan Kualitas Penulisan LKP dan LKI	Jumlah Peserta		100 Peserta	121	-	0	-	0	-	0	-	0	100 Peserta	121		
Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	1. Jumlah Kerjasama Kelitbang	0	2 Perjanjian Kerjasama	317	2 Perjanjian Kerjasama	1.301	2 Perjanjian Kerjasama	1.476	2 Perjanjian Kerjasama	1.675	2 Perjanjian Kerjasama	1.903	10 Perjanjian Kerjasama	6.672	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	
Fasilitasi Forum Komunikasi Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) Wilayah Kalimantan Barat	Jumlah Peserta HIMPENINDO		-	0	60 Peneliti	50	60 Peneliti	50	60 Peneliti	50	60 Peneliti	50	60 Peneliti	200		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Gathering Kelitbangan Se-Kalbar	Jumlah Mitra yang turut serta dalam Gathering		-	0	12 Mitra	60	12 Mitra	68	12 Mitra	78	12 Mitra	89	12 Mitra	295		
Idea Concept Paper (ICP) Kelitbangan	Dokumen Perencanaan Penelitian untuk 1 Tahun ke Depan		-	0	1 Dokumen	65	1 Dokumen	74	1 Dokumen	84	1 Dokumen	96	4 Dokumen	320		
Pelaksanaan Kerjasama Kelitbangan	Jumlah Kerjasama kelitbangan		2 Perjanjian Kerjasama	43	2 Perjanjian Kerjasama	49	2 Perjanjian Kerjasama	56	2 Perjanjian Kerjasama	64	2 Perjanjian Kerjasama	73	10 Perjanjian Kerjasama	286		
Pengelolaan Sistem Informasi Database Litbang	Jumlah Informasi kelitbangan		-		7 Data	64	7 Data	73	7 Data	83	7 Data	95	28 Data	315		
Pengendalian Mutu Penelitian	Jumlah Peneliti yang dikendalikan		-	0	12 Judul Penelitian	250	13 Judul Penelitian	285	13 Judul Penelitian	325	13 Judul Penelitian	370	59 Judul Penelitian	1.230		
Penyusunan Pedoman Panduan Kelitbangan	Jumlah Pedoman Panduan Kelitbangan		-	0	2 Pedoman	50	2 Pedoman	57	2 Pedoman	65	2 Pedoman	74	8 Pedoman	246		
Rakor Kelitbangan	Jumlah Lembaga Kelitbangan yang ikut serta rakor		14 Lembaga Kelitbangan	161	14 Lembaga Kelitbangan	184	14 Lembaga Kelitbangan	209	14 Lembaga Kelitbangan	239	14 Lembaga Kelitbangan	272	14 Lembaga Kelitbangan	1.064		
Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan	Keputusan Majelis Pertimbangan		2 Keputusan	113	2 Keputusan	129	2 Keputusan	147	2 Keputusan	168	2 Keputusan	191	2 Keputusan	748		
Riset Peningkatan Kompetensi Peneliti dan Perekayasa	Jumlah Peneliti/Perekayasa		-	0	9 Orang	200	9 Orang	228	9 Orang	260	9 Orang	296	9 Orang	984		
Seminar Nasional IPTEK	Jumlah Peserta Pemakalah		-	0	30 Peserta	200	30 Peserta	228	30 Peserta	260	30 Peserta	296	30 Peserta	984		
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat		1 Laporan	10	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Laporan	10		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		0	2 Terbitan	103	9 Buku, 2 Terbitan	318	9 Buku, 2 Terbitan	362	9 Buku, 2 Terbitan	413	9 Buku, 2 Terbitan	471	36 Buku, 10 Terbitan	1.667		
Diseminasi Hasil Kelitbangan	Jumlah Publikasi dan Informasi		-	0	9 Buku	200	9 Buku	228	9 Buku	260	9 Buku	296	36 Buku	984		
Pengelolaan Jurnal Penelitian dan Pengembangan (E-Jurnal)	Jumlah terbitan jurnal		2 Terbitan	103	2 Terbitan	118	2 Terbitan	134	2 Terbitan	153	2 Terbitan	175	2 Terbitan	683		
Sekretariat				2.040		2.735		2.925		3.939		3.667		15.306		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	100%	100%	1.089	100%	1.283	100%	1.462	100%	1.664	100%	1.895	100%	7.394	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat		10 Berkas	2	10 Berkas	1	10 Berkas	1	10 Berkas	1	10 Berkas	1	50 Berkas	6		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan		8 Rekening	152	10 Rekening	184	10 Rekening	210	10 Rekening	239	10 Rekening	273	48 Rekening	1.058		
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas		2 Unit Roda Empat, 3 Unit Roda Dua	3	2 Unit Roda Empat, 3 Unit Roda Dua	3	2 Unit Roda Empat, 3 Unit Roda Dua	5	2 Unit Roda Empat, 3 Unit Roda Dua	6	2 Unit Roda Empat, 3 Unit Roda Dua	7	2 Unit Roda Empat, 3 Unit Roda Dua	24		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek		1310 Lembar, 500 Lembar, 8 Buku	11	1500 Lembar, 500 Lembar, 8 Buku	16	1500 Lembar, 500 Lembar, 8 Buku	18	1500 Lembar, 500 Lembar, 8 Buku	20	1500 Lembar, 500 Lembar, 8 Buku	23	1500 Lembar, 500 Lembar, 8 Buku	88		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor		1 Unit	70	1 Unit	80	1 Unit	91	1 Unit	104	1 Unit	118	1 Unit	463		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor		55 Item	60	55 Item	72	55 Item	82	55 Item	94	55 Item	107	55 Item	414		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan pengandaan		16 Eksemplar	30	16 Eksemplar	34	16 Eksemplar	39	16 Eksemplar	45	16 Eksemplar	51	16 Eksemplar	199		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		105 Buah	5	105 Buah	6	105 Buah	6	105 Buah	7	105 Buah	8	525 Buah	33		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11 Item	25	15 Item	29	15 Item	32	15 Item	37	15 Item	42	15 Item	165		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		32 Item	9	26 jenis	10	26 jenis	11	26 jenis	13	26 jenis	14	26 jenis	57		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Jenis	16	1 Jenis	18	1 Jenis	21	1 Jenis	23	1 Jenis	27	5 Jenis	105		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman		374 Porsi	24	500 porsi	28	500 porsi	31	500 porsi	36	500 porsi	41	2374 porsi	160		
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Luar Daerah		40 Orang	213	40 Orang	243	40 Orang	277	40 Orang	316	40 Orang	360	40 Orang	1.411		
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		12 Orang	346	12 Orang	394	12 Orang	449	12 Orang	512	12 Orang	584	12 Orang	2.285		
Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		11 Orang	93	11 Orang	106	11 Orang	121	11 Orang	138	11 Orang	157	11 Orang	615		
Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		3 Item	10	3 Item	30	3 Item	34	3 Item	39	3 Item	44	3 Item	157		
Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata		12 Dokumen	11	12 Dokumen	15	12 Dokumen	15	12 Dokumen	15	12 Dokumen	15	12 Dokumen	71		
Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		3 Item	10	3 Item	15	3 Item	17	3 Item	19	3 Item	22	3 Item	84		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	493	100%	754	100%	711	100%	1.446	100%	808	100%	4.212	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	
Pengadaan AC/ Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin		4 Buah AC	24	5 Buah AC	31	5 Buah AC	38	5 Buah AC	45	5 Buah AC	52	24 Unit AC	190		
Pengadaan Perlengkapan /Peralatan kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor		28 Unit	168	20 Unit	168	20 Unit	192	20 Unit	218	20 Unit	249	128 Unit	995		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		7 Jenis	81	1 Jenis	2	4 Jenis	20	4 Jenis	23	4 Jenis	26	7 Jenis	151		
Pengadaan dan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		1 Unit	51	0	0	0	0	1 Unit	58	0	0	2 Unit	109		
Pengadaan Sarana/ Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli		1 Unit	35	1 Unit	85	1 Unit	97	1 Unit	110	1 Unit	126	1 Unit	453		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara		1 Unit	16	1 Unit	216	1 Unit	100	1 Unit	114	1 Unit	130	1 Unit	576		
Pemeliharaan Taman/ Halaman Kantor/ Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman halaman Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara		0	0	0	0	0	0	1 Unit	15	0	0	1 Unit	15		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara		2 Unit Kendaraan Roda 4 dan 3 Unit Kendaraan Roda 2	65	2 Unit Kendaraan Roda 4 dan 3 Unit Kendaraan Roda 2	68	2 Unit Kendaraan Roda 4 dan 3 Unit Kendaraan Roda 2	78	2 Unit Kendaraan Roda 4 dan 3 Unit Kendaraan Roda 2	88	2 Unit Kendaraan Roda 4 dan 3 Unit Kendaraan Roda 2	101	2 Unit Kendaraan Roda 4 dan 3 Unit Kendaraan Roda 2	400		
Pemeliharaan Rutin /Berkala AC/Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara		20 Unit	15	25 Unit	26	25 Unit	30	25 Unit	34	25 Unit	39	25 Unit	143		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara		50 Unit	15	55 Unit	23	55 Unit	26	55 Unit	30	55 Unit	34	55 Unit	128		
Pembangunan Plank Nama Kantor	Luas Plank Nama Kantor		0	0	3 M ²	50	0	0	0	0	0	0	3 M ²	50		
Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Volume Jalan/ Jembatan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan		0	0	0	0	0	0	150 M ²	100	0	0	0	100		
Pembangunan Saluran Air	Luas Saluran Air		-	0	40 M ²	50	0	0	0	0	0	0	40 M ²	50		
Pengadaan Bak Air / Menara Air	Jumlah Bak Air/ Menara Air		-	0	-	0	-	0	1 Unit	65	-	0	1 Unit	65		
Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair		4 Unit	24	-	0	5 Unit, 12 Buah	91	-	0	-	0	9 Unit , 12 Buah	115		
Pemeliharaan Instalasi Listrik/ Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/ Telepon yang terpelihara		-	0	2 Buah	35	2 Buah	40	2 Buah	45	2 Buah	52	2 Buah	172		
Rehabilitasi/ peningkatan gedung kantor	Luas Gedung Kantor		-	0	-	0	-	0	835 M ²	500	-	0	-	500		
Program Peningkatan Disiplin Sumber Aparatur	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur		100%	35	100%	120	100%	137	100%	156	100%	208	100%	655	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	
Pengadaan Pakaian Dinas/ Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		56 Stel	35	56 Stel	50	56 Stel	57	56 Stel	65	56 Stel	74	280 Stel	281		
Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		-	0	56 Stel	50	56 Stel	57	56 Stel	65	56 Stel	74	224 Stel	246		
Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai		-	0	56 Buah	20	56 Buah	23	56 Buah	26	56 Buah	30	224 Buah	98		
Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Jumlah Mesin/ Kartu absensi		-	0	-	0	-	0	-	0	1 Unit	30	1 Unit	30		
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1 Tahun	139	1 Tahun	254	1 Tahun	249	1 Tahun	267	1 Tahun	287	1 Tahun	1.196	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	
Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7 Orang	33	7 Orang	40	7 Orang	46	7 Orang	52	7 Orang	59	35 Orang	230		
Sosialisai, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisai, Bimbingan Teknis, Workshop		30 Orang	30	30 Orang	34	30 Orang	39	30 Orang	44	30 Orang	50	150 Orang	197		
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai		9 PAK	15	9 PAK	15	9 PAK	15	9 PAK	15	9 PAK	15	45 PAK	75		
Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani		3 Jenis	32	2 Jenis	37	2 Jenis	42	2 Jenis	48	2 Jenis	55	3 Jenis	213		
Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan		1 Dokumen	29	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	5 Dokumen	169		
Penyusunan DUK	Jumlah DUK		-	0	1 Dokumen	18	1 Dokumen	18	1 Dokumen	18	1 Dokumen	18	4 Dokumen	72		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Penyusunan SOP Badan/ Dinas	Jumlah Standar Operasional Prosedur		-	0	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	4 Dokumen	60		
Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja		-	-	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	4 Dokumen	40		
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Kompeten		-	-	56 Orang	30	56 Orang	30	56 Orang	30	56 Orang	30	224 Orang	120		
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN		56 Orang	20	56 Orang	20	56 Orang	20	56 Orang	20	56 Orang	20	280 Orang	100		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu		100%	270	100%	307	100%	346	100%	384	100%	443	100%	1.751	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan		5 Dokumen	25	5 Dokumen	28	5 Dokumen	32	5 Dokumen	35	5 Dokumen	35	25 Dokumen	155		
Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP		1 Dokumen	16	1 Dokumen	19	1 Dokumen	21	1 Dokumen	24	1 Dokumen	28	5 Dokumen	108		
Penyusunan RENSTRA	Jumlah Renstra										1 Dokumen	20	1 Dokumen	20		
Penyusunan RENJA	Jumlah Renja SKPD		1 Dokumen	21	1 Dokumen	24	1 Dokumen	27	1 Dokumen	31	1 Dokumen	35	5 Dokumen	138		
Penyusunan dan Laporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ		2 Dokumen	19	2 Dokumen	21	2 Dokumen	24	2 Dokumen	27	2 Dokumen	31	10 Dokumen	123		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev		1 Dokumen	67	1 Dokumen	77	1 Dokumen	87	1 Dokumen	100	1 Dokumen	114	5 Dokumen	444		
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA		2 Dokumen	27	2 Dokumen	30	2 Dokumen	35	2 Dokumen	35	2 Dokumen	35	10 Dokumen	161		
Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis OPD		1 Dokumen	36	1 Dokumen	41	1 Dokumen	46	1 Dokumen	53	1 Dokumen	60	5 Dokumen	235		
Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran		1 Dokumen	30	1 Dokumen	34	1 Dokumen	39	1 Dokumen	44	1 Dokumen	50	5 Dokumen	197		
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi		1 Dokumen	30	1 Dokumen	34	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	1 Dokumen	35	5 Dokumen	169		
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	15	100%	17	100%	19	100%	22	100%	25	100%	98	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	
Penyusunan/ Pelaporan Inventaris Aset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah		1 Dokumen	15	1 Dokumen	17	1 Dokumen	19	1 Dokumen	22	1 Dokumen	25	5 Dokumen	98		

**Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
BELANJA LANGSUNG	1.693.940.000	2.655.665.500	2.543.973.600	1.048.061.000	1.239.657.000	1.681.511.500	2.592.217.210	2.510.112.090	1.034.442.000	1.231.240.457	19	20	25	12	14	0	0
Program Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan	1.022.500.000	1.185.533.500	1.100.000.000	413.616.000	325.000.000	1.014.072.800	1.161.397.840	1.096.636.400	413.141.000	324.558.000	9	7	12	5	4	0	0
Studi Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Pontianak	140.000.000					139.786.400					0,998474						
Studi Pendirian Pabrik Pengolahan Kopi di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Pontianak	120.000.000					119.804.500					0,998371						
Studi Pemasaran Produk Primer dan Olahan Kopi	120.000.000					119.804.500					0,998371						
Studi Usahatani Kopi Di Kalimantan Barat	110.000.000					108.955.500					0,990505						
Kajian Pengembangan Kawasan Kampung Budaya Keraton di Kabupaten Pontianak	57.500.000					55.007.300					0,956649						
Kajian Pengembangan Wisata Tenun di Desa Seberang Kabupaten Sambas	58.250.000					55.505.000					0,952876						
Kajian Pengembangan Kawasan Wisata Rumah Betang di Kabupaten Landak	58.000.000					56.777.600					0,978924						
Kajian Pengembangan Potensi Home Industri Baidi di Kabupaten Bengkayang	58.750.000					58.587.500					0,997234						
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis PDRB Hijau	300.000.000					299.844.500					0,999482						
Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Pengembangan Komoditas Unggulan di Kabupaten Bengkayang		149.704.500					144.082.500				0,962446						
Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Pengembangan Komoditas Unggulan di Kabupaten Landak		150.829.000					144.391.500				0,957319						
Analisis Peluang Industri Berbahan Baku Karet Rakyat di Kalimantan Barat		155.000.000					152.690.000				0,985097						
Analisis Pemasaran Karet Rakyat di Kalimantan Barat		145.000.000					144.063.640				0,993542						
Pengembangan Model Usahatani Karet Rakyat di Kalimantan Barat		135.000.000					133.298.400				0,987396						
Upaya Meningkatkan Produksi Karet Rakyat Di Kalimantan Barat		150.000.000					149.338.600				0,995591						
Pengkajian Wisata Budaya Berbasis Masyarakat		300.000.000					293.533.200				0,978444						
Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah tertinggal di Kalbar			75.000.000					74.981.200					0,999749				
Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat			75.000.000					74.735.200					0,996469				
Model dan Strategi Produk Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat			75.000.000					74.998.000					0,999973				
Model dan Strategi Pengembangan Produk Pangan Dalam Rangka Mendukung Program Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Barat			75.000.000					74.998.000					0,999973				
Interaksi Masyarakat di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat			77.000.000					76.692.000					0,996				
Strategi Kelangsungan Hidup Masyarakat Perbatasan di Kalimantan Barat			73.000.000					72.692.000					0,995781				
Pengembangan Industri Hilir Jagung Untuk Mendukung Ekonomi Rakyat			75.000.000					75.000.000					1				
Pengembangan Industri Hilir Kakao Untuk Mendukung Ekonomi Rakyat			75.000.000					75.000.000					1				
Teknologi Budidaya Tanaman Bawang Merah Pada Media Tanam			85.000.000					83.833.400					0,986275				
Teknologi Budidaya Jamur Kuping Pada Berbagai Media Tanam			65.000.000					64.243.000					0,988354				
Desain Model Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Berbasis Potensi Lokal			150.000.000					149.856.000					0,99904				
Identifikasi Sub Sub Suku Dayak di Kalbar			200.000.000					199.607.600					0,998038				
Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten di Kalimantan Barat				76.504.000					76.504.000					1			
Model dan Strategi Pengembangan Produk Ternak dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Produk Ternak di Kalbar				84.904.000					84.484.000					0,995053			
Pengembangan Pestisida Hayati				83.624.000					83.624.000					1			
Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kalbar				84.904.000					84.904.000					1			
Varitas Kedele pada berbagai Jenis Tanah di kalbar				83.680.000					83.625.000					0,999343			

Identifikasi Sub Suku Dayak di Kalimantan Barat					100.000.000						100.000.000						1	
Potensi Seni dan Warisan Budaya dalam Pengembangan Industri Kreatif					75.000.000						74.748.000						0,99664	
Pengembangan Bahan Pupuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah					75.000.000						74.830.000						0,997733	
Model dan Strategi Peningkatan Produksi Komuditas Pangan Dalam Rangka Mendukung Program Ketahanan pangan					75.000.000						74.980.000						0,999733	
PROGRAM KELITBANGAN PENDUKUNG	671.440.000	1.470.132.000	1.443.973.600	634.445.000	914.657.000	667.438.700	1.430.819.370	1.413.475.690	621.301.000	906.682.457	10	14	13	7	10	0	0	
Updating Database Litbang	0	100.000.000	40.642.000	0	44.000.000	0	96.025.500	40.421.000	0	44.000.000	0	0,960255	0,994562	0	1			
Seminar Riset (3 Bidang)	67.500.000	67.700.000	92.960.000	88.410.000	87.150.000	67.492.500	60.800.000	90.610.000	86.860.000	87.100.000	0,999889	0,89808	0,97472	0,982468	0,999426			
Idea Concept Paper (ICP)	15.400.000	20.000.000	10.625.000	12.000.000	12.000.000	15.400.000	20.000.000	10.625.000	12.000.000	12.000.000	1	1	1	1	1			
Rakoda Litbang	159.000.000	119.880.000	153.060.000	0	142.800.000	157.816.700	116.045.200	151.863.800	0	140.833.600	0,992558	0,968011	0,992185	0	0,98623			
Pengelolaan Jurnal Litbang	0	114.486.000	138.951.000	92.027.000	141.928.500	0	109.056.000	136.798.000	92.027.000	141.435.612	0	0,952571	0,984505	1	0,996527			
Fasilitasi Forum Group Discussion (FGD) Bidang Sosial dan Pemerintahan	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	97.647.995	0	0	0	0	0,97648			
Lomba Karya Ilmiah	121.500.000	127.000.000	202.525.600	213.250.000	141.928.500	121.500.000	126.800.000	199.450.600	213.246.000	140.258.500	1	0,998425	0,984817	0,999981	0,988234			
Lomba Karya Perekayasaan	98.440.000	120.000.000	121.235.000	101.270.000	114.850.000	95.775.000	117.721.370	119.796.290	100.050.000	113.466.000	0,972928	0,981011	0,988133	0,987953	0,987949			
Fasilitasi Forum Group Discussion (FGD) Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	99.940.750	0	0	0	0	0,999408			
Riset Peningkatan Kapasitas peneliti/Perekayasa	0	150.000.000	75.000.000	80.000.000	30.000.000	0	147.972.500	74.095.000	76.191.000	30.000.000	0	0,986483	0,987933	0,952388	1			
Monitoring Pelaksanaan Litbangyasa	24.500.000	0	0	0	0	24.472.000	0	0	0	0	0,998857	0	0	0	0			
Evaluasi Pelaksanaan Litbangyasa	0	26.000.000	27.340.000	0	0	0	24.185.000	26.638.000	0	0	0	0,930192	0,974323	0	0			
Penerbitan Jurnal Penelitian dan Pengembangan	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
Updating Database Hasil Penelitian dan Pengembangan	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
Penyusunan Profil Kantor Penelitian dan Pengembangan	23.100.000	0	0	0	0	23.100.000	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)	0	310.000.000	328.660.000	0	0	0	307.560.000	328.020.000	0	0	0	0,992129	0,998053	0	0			
Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	0	99.066.000	34.457.000	0	0	0	98.916.000	33.282.000	0	0	0	0,998486	0,9659	0	0			
Fasilitasi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Se-Kalimantan Barat	79.000.000	0	16.261.000	0	0	78.882.500	0	10.742.000	0	0	0,998513	0	0,660599	0	0			
Fasilitasi Rakornas Litbang dan Rakor Forum FKPPD Regional Tengah	0	76.000.000	0	0	0	0	75.211.600	0	0	0	0	0,989626	0	0	0			
Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Litbangyasa	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0			
Fasilitasi FGD	0	120.000.000	140.766.000	47.488.000	0	0	110.526.200	129.644.000	40.927.000	0	0	0,921052	0,920989	0,861839	0			
Fasilitasi Koordinasi Litbang Se Kalbar	0	0	61.491.000	0	0	0	0	61.490.000	0	0	0	0	0,999984	0	0			

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA T			
				1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan untuk Mendukung Kebijakan Daerah		Jumlah Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk mendukung Kebijakan Daerah	14 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	22 Rekomendasi
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan olah bidang sosial dan pemerintahan	8 Rekomendasi	6 Rekomendasi	7 Rekomendasi	11 Rekomendasi
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan olah bidang ekonomi dan pembangunan	5 Rekomendasi	9 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan olah bidang sosial dan pemerintahan	0	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	1 Rekomendasi
			Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi	1 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi
		Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Jumlah Kerjasama Kelitbangan	2 Perjanjian Kerjasama	2 Perjanjian Kerjasama	2 Perjanjian Kerjasama	2 Perjanjian Kerjasama
			Jumlah Publikasi Penelitian, Perekayasaan dan Inovasi daerah	2 Terbitan	9 Buku dan 2 Terbitan	9 Buku dan 2 Terbitan	9 Buku dan 2 Terbitan

SAHUN KE-

5

20 Rekomendasi

7

Rekomendasi

9

Rekomendasi

1

Rekomendasi

3

Rekomendasi

2 Perjanjian
Kerjasama

9 Buku dan
2 Terbitan

LAMPIRAN CASCADING PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Produktif, Inovatif dan Profesional	Meningkatkan Kualitas Kolaborasi untuk mendukung kebijakan daerah	5.05	RESEARCH DAN PENGEMBANGAN																Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan / Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di sampaikan / Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi.	-	80%	-	85%	-	90%	3.721.982.845	95%	9.985.000.000	100%	9.985.000.000	100%	23.411.982.845			
1.			5.05.02.1.01	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	4 Dokumen	501.118.311	15 Dokumen	2.185.000.000	15 Dokumen	2.185.000.000		4.871.118.311	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat		
			5.05.02.1.01.01	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Tertaksananya Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	800.000.000		Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.01.02	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Tertaksananya Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	53.636.112	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	173.636.112		Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.01.03	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tertaksananya Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	400.000.000		Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.01.04	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Tertaksananya Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	400.000.000		Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.01.05	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Tertaksananya Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	400.000.000		Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.01.06	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Ketenraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tertaksananya Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Ketenraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	100.000.000		Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.01.07	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Tertaksananya Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000		Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.01.08	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Tertaksananya Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000		Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.01.09	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Tertaksananya Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000		Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.01.10	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Tertaksananya Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000		Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.01.11	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Tertaksananya Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	310.073.727	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	710.073.727		Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kolaborasi dan Peraturan	Tertaksananya Pengelolaan Data Kolaborasi dan Peraturan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000		Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tertaksananya Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	51.884.983	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	451.884.983		Provinsi Kalimantan Barat	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Ajaran Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			5.05.02.1.01.14	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Perairan	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Perairan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.01.15	Facilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diberikannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Terlaksananya Penerbitan Izin Penelitian Bagi Warga Negara Asing	-	n/a Rekomendasi	-	n/a Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	85.523.489	1 Rekomendasi	75.000.000	1 Rekomendasi	75.000.000	3 Rekomendasi	235.523.489		Provinsi Kalimantan Barat
2.			5.05.02.1.02	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	n/a %	-	n/a %	-	100%	655.600.463	100%	2.650.000.000	100%	2.650.000.000		5.675.600.463	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	600.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	600.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	110.298.993	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	910.298.993		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	600.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	209.628.993	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	709.628.993		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	209.628.993	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	709.628.993		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	50.701.767	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	650.701.767		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	20.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	75.341.717	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	275.341.717		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	400.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
3.			5.05.02.1.03	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	n/a %	-	n/a %	-	100%	1.152.182.215	100%	3.600.000.000	100%	3.600.000.000		8.352.182.215	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	138.226.120	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	538.226.120		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	41.296.454	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	441.296.454		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	600.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	141.792.725	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	1.141.792.725		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	600.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	140.514.286	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	740.514.286		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	355.682.368	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	755.682.368		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	192.192.355	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	692.192.355		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	142.477.907	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	742.477.907		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	500.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	500.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	500.000.000		Provinsi Kalimantan Barat

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			5.05.02.1.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	600.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
4.			5.05.02.1.04	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	-	n/a %	-	n/a %	-	100%	1.413.081.856	100%	1.550.000.000	100%	1.550.000.000		4.513.081.856	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	
			5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	391.273.422	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	1.391.273.422		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.04.02	Uj Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Uj Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/ Model Reproduksi dan Inovasi	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	239.692.957	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	1.239.692.957		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	300.000.000		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Terlaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbang	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	669.876.763	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	1.069.876.763		Provinsi Kalimantan Barat
			5.05.02.1.04.05	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	n/a Dokumen	-	n/a Dokumen	-	1 Dokumen	112.238.714	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	512.238.714		Provinsi Kalimantan Barat